

TUGAS KELOMPOK ANALISA ARTIKEL

Bergabunglah secara kelompok , dengan anggota kelompok 5-6 orang untuk diskusi :

1. Permasalahan ekonomi apa yang terjadi sesuai artikel?
2. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi?
3. Apakah permasalahan tersebut termasuk permasalahan ekonomi modern what/how/for whom? Mengapa?
4. Tulislah 3 pembelajaran/wawasan baru yang didapatkan dari artikel.

Kisah Kodak Bangkrut Gara-Gara Remehkan Inovasi Karyawan

Thea Arbar, CNBC Indonesia
28 July 2024 10:30



Foto: Reuters

Jakarta, CNBC Indonesia - Kodak adalah salah satu produsen kamera yang dikenal dunia. Ini terjadi setelah George Eastman, pendiri Kodak, menemukan kamera modern pada 1888 silam, yang kemudian menjadi tonggak sejarah dunia fotografi modern.

Perusahaan Kodak pun menjadi legenda hingga kebesaran namanya harus terhenti pada 2013. Alasannya sepele: para bos takut akan perubahan dan gagal melihat tantangan zaman.

Berikut perjalanan awal mula penemuan Eastman, ketenaran Kodak hingga terhenti pada 2013, sebagaimana dirangkum oleh Tim Riset CNBC Indonesia.

Awal Mula Penemuan Eastman

Zaman dahulu, kamera masih berukuran besar yang ukurannya seperti microwave. Untuk mengambil visual, seseorang perlu membawa tripod besar, plat kaca, dan berbagai zat kimia. Tentu kegiatan fotografi zaman dulu super ribet dan tak praktis seperti sekarang.

Namun, bagi pecinta fotografi itu semua bukan halangan. Setidaknya itulah yang ada di pikiran George Eastman saat liburan ke Dominika pada 1878. Dia membawa semua peralatan fotografi dengan biaya menembus ratusan dolar.

Sebagaimana dipaparkan Elizabeth Brayer dalam *George Eastman: A Biography* (2006), saat itu Eastman sadar hobinya sangat mahal, sehingga dia memutuskan putar otak supaya sedikit keluar uang. Kebetulan tak lama terbit jurnal ilmiah terkait formula kimia untuk menghasilkan satu gambar dari kamera.

Uji Coba Berulang dan Kelahiran Kodak

Eastman kemudian membaca jurnal ilmiah tersebut secara saksama dan mempraktikannya agar lebih

sempurna. Prosesnya memakan waktu 3 tahun.

Selama itu tak terhitung berapa kali dia gagal. Yang pasti setelah ratusan kali mencoba, Eastman berhasil membuat pelat kering dalam fotografi yang membuat orang tak lagi repot-repot membawa bahan kimia

Plat kering itulah yang kemudian dipatenkan dan membuat pegawai bank itu terjun ke bisnis fotografi di bawah bendera Eastman Dry Plate Company pada 1881. Tujuh tahun kemudian, dia bersama William Hall Walker melahirkan kamera analog modern bernama Kodak.

Gara-gara Kodak, orang-orang tak lagi susah payah membawa peralatan fotografi yang besar. Hanya perlu memakai kamera segenggam tangan, orang bisa mudah mengambil gambar. Entah profesional atau amatir.

Tak heran, setelahnya nama Kodak dan Eastman melambung tinggi. Berkat pabrik ini pula dunia mengenal gambar warna-warni. Sejarah fotografi dunia tak bisa lepas dari Kodak.

Sayang, Kodak yang dikenal pandai berinovasi berakhir bangkrut pada 2013. Alasannya seperti yang sudah disebut: takut akan perubahan dan gagal melihat tantangan zaman.

Kejadian ini bermula pada 1970-an. Insinyur Kodak, Steve Sasson, menemukan kamera digital, yang kini jadi kelaziman. Mengutip WE Forum, penemuan itu sebenarnya bisa membuat Kodak melangkah lebih jauh. Sayang, para pimpinan punya pikiran kolot. Tak paham kalau dunia fotografi tak pernah usai berinovasi.

"Itu bagus, tapi jangan ngasih tau ke siapapun," ucap Sasson menirukan jawaban para bosnya, kepada New York Times saat itu.

Pimpinan menganggap temuan Sasson punya banyak kelemahan. Sebut saja seperti pemrosesan yang lama, resolusi rendah hingga bobot kamera yang besar. Bisa saja terwujud di tahun 1970-an, tapi itu sama saja membunuh eksistensi Kodak sebagai penghasil kamera analog. Jika dibiarkan, perusahaan bisa bangkrut.

Alhasil, mimpi lahirnya kamera digital dari Kodak terkubur. Akan tetapi, 2-3 dekade kemudian dunia fotografi berputar cepat. Kamera digital yang diremehkan muncul mengalahkan kamera analog. Pada titik ini, Kodak sudah kehilangan start sebab kamera digital sudah diciptakan pabrikan lagi.

Upaya mewujudkan inovasi baru sudah gagal. Akibatnya, kondisi ini menambah parah kesulitan finansial yang menimpa Kodak. Hingga akhirnya, perusahaan legendaris ini bangkrut pada 2013 silam

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240728092838-37-558184/kisah-kodak-bangkrut-gara-gara-remehkan-inovasi-karyawan>

5 BUMN Bermasalah yang Terancam Dibubarkan Selama 2024



Oleh Choiriyah Indriyati Putri

Kamis, 2 Januari 2025 - 09:00 WIB

Share

Logo BUMN (Foto: Shutterstock / Abdurrahim Husain)

Dihadapkan dengan berbagai masalah finansial, beberapa perusahaan milik negara terancam dibubarkan dalam waktu dekat.

Pada pertengahan tahun 2024 lalu, Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Yadi Jaya Ruchandi, menyampaikan bahwa terdapat beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi dihentikan operasionalnya.

Yadi Jaya menjelaskan, dari 21 BUMN dan satu anak usaha BUMN berstatus titip kelola yang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) hanya ada 4 perusahaan yang berpotensi bangkit dan 5 BUMN yang terancam dibubarkan.

Dari 5 perusahaan tersebut, ada beberapa yang sudah beroperasi selama puluhan tahun, namun tetap tidak bisa bertahan ketika kondisi ekonominya sedang bergejolak.

Daftar BUMN Bermasalah yang Terancam Bangkrut

1. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)

PT Dok dan Perkapalan Surabaya atau disingkat DPS merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di jasa pembangunan kapal baru dan perbaikan kapal.

Perusahaan ini telah diresmikan pada tanggal 8 Januari 1976 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia kala itu, yakni Prof. Dr. H. Emil Salim.

Namun sayangnya, DPS dikabarkan terancam bangkrut karena terlilit utang dalam beberapa tahun terakhir.

2. PT Indah Karya (Persero)

PT Indah Karya juga menjadi salah satu perusahaan milik negara yang terancam bangkrut pada 2024 lalu. Hal ini terjadi karena PT Indah Karya sempat terjerat PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara selama 44 hari.

Keputusan PKPU PT Indah Karya sendiri ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Agustus 2024.

Penyebab PT Indah Karya berstatus PKPU adalah karena kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban Sukuk Mudharabah I PT Indah Karya Tahun 2018. Adapun surat utang tersebut telah jatuh tempo pada 28 November 2021.

Sebagai informasi, PT Indah Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan manajemen. Perusahaan ini telah didirikan sejak tahun 1961 yang berkantor pusat di Bandung.

3. PT Amarta Karya (Persero)

PT Amarta Karya atau Amka merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang konstruksi, manufaktur, serta investasi. Perusahaan ini berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat dan telah berdiri sejak tahun 1962.

Pada awalnya, perusahaan ini terbentuk dari penggabungan (merger) antara dua perusahaan di Semarang, yakni NV Lindeteves Stokvis serta Fa. De Vri'es Robbe (NV Constructie Werkplaatsen De Vri'es Robbe Lindeteves).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Amca terancam bangkrut karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek fiktif yang juga menjerat mantan Direktur Utama serta mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya.

Kasus korupsi tersebut telah melibatkan keuangan negara hingga mencapai Rp46 miliar. Selain itu, PT Amarta Karya juga mengalami kendala dalam menyelesaikan proyek yang dijalankan, seperti proyek Bukit Algoritma yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat.

4. PT Barata Indonesia (Persero)

Meski 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah, PT Barata Indonesia ternyata tetap tidak berdaya ketika berhadapan dengan tunggakan [utang yang menumpuk](#). Akibatnya, Barata Indonesia terancam bangkrut dan dibubarkan oleh pemerintah.

Perlu diketahui, PT Barata Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dan pengecoran (foundry) yang memproduksi komponen kereta api dan kapal, peralatan manufaktur semen, hingga produk peralatan pabrik gula.

Awalnya, PT Barata Indonesia didirikan pada 1971 dengan nama PT Barata Metalworks & Engineering.

Kemudian, melalui Akta Notaris Mochamad Ali Nomor 29 tanggal 23 November 1981, nama PT Barata Metalworks & Engineering diubah secara resmi menjadi PT Barata Indonesia.

5. PT Semen Kupang (Persero)

PT Semen Kupang merupakan pabrik semen milik negara yang dibangun pada tanggal 22 Desember 1980.

Adapun tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk melaksanakan serta menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan nasional, khususnya di industri persemenan dan kimia dasar lainnya.

PT Semen Kupang sempat meraih kesuksesan dengan memiliki kapasitas produksi hingga 120 ribu ton per tahun.

Sayangnya, pada beberapa tahun terakhir, PT Semen Kupang kerap masuk potensi operasi minimum dan mengalami [masalah finansial berkelanjutan](#).

https://www.google.com/search?q=bumn+yang+bangkrut+2024&oq=bumn+yang+bangkrut&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyCOgAEFEUYORiABDIHCAEQABiABDIICAQABgWGB4yCAgDEAAYFhgeMggIBBAAGBYHjIIICAUQABgWGB4yCAgGEAAYFhgeMggIBxAGBYHjIIICAQABgWGB4yCAgJEAAAYFhgeOgEINjY3MGowajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Sritex Bangkrut! Ini Kronologi Lengkap Kehancuran Sang Raksasa Tekstil



PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) adalah salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia, resmi menutup operasionalnya per 1 Maret 2025. Keputusan ini berdampak langsung pada sekitar 8.400 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Proses ini terjadi setelah Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Sritex dalam status pailit akibat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon.

Penutupan ini menandai akhir dari perjalanan panjang Sritex sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Sebelum keputusan pailit dijatuhkan, Sritex perusahaan apa? Sritex adalah perusahaan yang bergerak di industri tekstil, khususnya dalam produksi kain, seragam militer, dan pakaian jadi. Namun, perusahaan telah berjuang menghadapi berbagai tantangan finansial yang membuat operasionalnya semakin sulit dipertahankan. Akibatnya, seluruh karyawan menerima surat PHK sebagai bagian dari proses likuidasi yang kini ditangani oleh tim kurator.

Dikutip dari [Liputan6](#) pada Selasa (4/3/2025), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa Sritex PHK karyawan ini mulai efektif pada 26 Februari 2025, sementara operasional perusahaan masih berjalan hingga 28 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa keputusan PHK sudah ditetapkan pada tanggal tersebut.

Kronologi Penutupan Sritex dan PHK Massal

Keputusan pailit PT Sritex bermula dari gugatan yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon di Pengadilan Niaga Semarang. Pada akhir Februari 2025, pengadilan memutuskan bahwa Sritex dan tiga anak usahanya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya tidak dapat melanjutkan operasional karena beban utang yang terlalu besar.

Pada 26 Februari 2025, tim kurator resmi mengeluarkan keputusan Sritex PHK karyawan terhadap seluruh karyawan Sritex Group. Para pekerja menerima surat PHK sebagai syarat pencairan hak-hak mereka, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex, Widada, membenarkan bahwa mayoritas karyawan telah mengisi formulir PHK untuk mempercepat pencairan hak mereka.

Sebelum bangkrut, Sritex dikenal dengan berbagai produk tekstilnya, termasuk kain seragam militer, pakaian jadi, dan kain berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan industri dan [fashion](#).

Hak-Hak Karyawan Pasca PHK

Seiring dengan penutupan Sritex, ribuan karyawan kini tengah mengurus hak-hak mereka, termasuk pesangon, gaji yang tertunda, serta jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan informasi dari Disperinaker Sukoharjo, pembayaran jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) akan dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sumarno menyatakan bahwa jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun karyawan aman karena sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, meskipun sempat ada keterlambatan pendaftaran pada bulan Februari 2025.

Namun, pesangon dan THR karyawan masih belum bisa dicairkan sepenuhnya karena bergantung pada hasil likuidasi aset perusahaan. Dalam hasil rapat kreditur, dijelaskan bahwa pesangon dan THR akan dibayarkan setelah aset berhasil terjual atau ada investor baru yang masuk.

Dampak Penutupan Sritex

Penutupan Sritex membawa dampak signifikan, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi perekonomian lokal di Sukoharjo dan sekitarnya. Banyak buruh yang mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatiran atas masa depan mereka setelah kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba.

Di media sosial, beberapa karyawan Sritex membagikan kisah mereka mengenai kesulitan mencari pekerjaan baru. Beberapa unggahan juga menyampaikan harapan agar ada solusi dari pemerintah untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan pengganti.

Meskipun demikian, Disperinaker Sukoharjo menyatakan telah menyiapkan lowongan kerja di perusahaan lain sebagai langkah mitigasi dampak Sritex PHK karyawan ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sebagaimana dikutip [Detik.com](https://www.detik.com) menyatakan bahwa eks buruh PT Sritex bisa bekerja kembali dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pihak kurator PT Sritex mengungkapkan bahwa mereka sedang membuka lelang untuk penyewaan aset Sritex, dengan beberapa investor yang telah berkomunikasi terkait hal ini. Yassierli menegaskan bahwa langkah ini diharapkan bisa memberikan ketenangan bagi para pekerja yang terkena PHK.

Yassierli juga menambahkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group, termasuk hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. Selain itu, ia memastikan bahwa hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan seperti JHT dan JKP akan tetap tersedia dan dapat segera dimanfaatkan oleh para pekerja.

Kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menjelaskan bahwa timnya telah membuka opsi penyewaan alat berat untuk meningkatkan harta pailit dan menjaga nilai aset perusahaan. Beberapa investor telah menghubungi kurator, dan dalam dua minggu ke depan akan diputuskan siapa yang akan menyewa aset tersebut. Dengan demikian, eks buruh PT Sritex berpeluang untuk dipekerjakan kembali dengan skema baru oleh penyewa yang terpilih.

Penutupan Sritex menjadi pukulan besar bagi industri tekstil nasional yang sebelumnya mengalami tekanan akibat persaingan global dan naiknya harga bahan baku. Dengan Sritex bangkrut, sektor ini menghadapi tantangan baru, termasuk kemungkinan merosotnya daya saing produk tekstil Indonesia di pasar internasional.

Beberapa analis industri menilai bahwa penutupan Sritex dapat menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera melakukan intervensi terhadap industri tekstil nasional. Langkah-langkah seperti insentif pajak, bantuan modal kerja, dan kebijakan proteksi industri lokal bisa menjadi solusi untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

Saat ini, keputusan akhir mengenai aset dan kewajiban Sritex masih menunggu hasil sidang di Pengadilan Niaga Semarang. General Manager Sritex Group, Haryo Ngadiyono, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan sidang terakhir pada 28 Februari 2025 sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Para karyawan yang terkena PHK juga masih berharap ada investor baru yang dapat mengambil alih operasional Sritex dan membuka kembali lapangan pekerjaan yang hilang. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait kemungkinan tersebut.

<https://www.lbs.id/publication/berita/sritex-bangkrut-ini-kronologi-lengkap-kehancuran-sang-raksasa-tekstil>

Bangkrut! Kisah 4 Perusahaan Besar di Indonesia yang Hancur karena Utang



Sejumlah perusahaan besar yang pernah berjaya pada masanya kini mengalami kebangkrutan dengan berbagai penyebab. Salah satu faktor utama yang sering menjadi alasan adalah utang dalam jumlah besar yang sulit terbayar.

Sahabat LBS, mari kita bahas 4 perusahaan yang sempat menjadi raksasa namun akhirnya tumbang, serta pelajaran penting yang bisa diambil terkait modal kerja, pendanaan syariah, dan pembiayaan yang sehat.

1. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA)

SAEA adalah perusahaan teh legendaris yang berdiri sejak 1973 dan terkenal dengan produk teh celupnya. Sayangnya, perusahaan ini dinyatakan pailit pada 2018 karena tidak mampu membayar cicilan kredit utang kepada Bank ICBC Indonesia. Total utangnya mencapai sekitar US\$ 20.505.116 atau Rp 316 miliar.

Ketidakmampuan Sariwangi dalam mengelola modal kerja dan utang dengan bijak menjadi salah satu faktor yang mempercepat kejatuhannya. Kejadian ini menjadi contoh nyata pentingnya memilih pendanaan yang tepat, termasuk mempertimbangkan [pembiayaan syariah](#) yang lebih transparan dan beretika.

2. Nyonya Meneer

Sebagai salah satu perusahaan jamu tertua di Indonesia, Nyonya Meneer telah mengukir sejarah panjang dalam dunia herbal. Namun, pada 2017 perusahaan ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Penyebab utamanya adalah perselisihan internal keluarga, [utang yang besar](#), serta kurangnya inovasi produk yang berasal dari kurangnya [ide bisnis](#) yang kreatif.

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), utang perusahaan kepada kreditur mencapai Rp 7,04 miliar. Kasus ini menyoroti bagaimana pengelolaan keuangan yang buruk dan kurangnya perencanaan modal kerja dapat membawa perusahaan besar sekalipun menuju kehancuran.

3. 7-Eleven (Sevel)

Sevel sempat menjadi ikon *convenience store* [anak muda](#) Indonesia pada era 2010-an dengan produk andalannya seperti Slurpee. Namun, pada 2017 anak perusahaan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) menutup seluruh gerai Sevel akibat tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan.

Besarnya kebutuhan modal kerja untuk operasional yang tidak dikelola dengan baik menunjukkan pentingnya akses terhadap pendanaan yang efektif. Pendanaan berbasis *securities crowdfunding* dapat menjadi solusi modern yang sesuai dengan prinsip syariah untuk bisnis serupa yang ingin berkembang tanpa terbebani utang konvensional.

4. Kodak

Sebagai pionir industri fotografi sejak 1892, Kodak atau Eastman Kodak Company asal Amerika Serikat menghadapi [kebangkrutan](#) pada 2012 karena gagal bersaing di era digital. Keengganan untuk berinovasi membuat mereka tertinggal dari kompetitor yang lebih adaptif.

Selain inovasi, belajar dari kisah Kodak modal kerja yang sehat dan strategi pembiayaan yang tepat sangat penting untuk menghadapi dinamika pasar yang berubah cepat.

Penyebab Umum Perusahaan Bangkrut

Dari berbagai kasus di atas, sebagaimana dikutip dari [CNBC](#) pada Jumat (31/01) ada beberapa faktor umum yang menyebabkan perusahaan, baik besar maupun kecil, mengalami kebangkrutan:

1. Utang yang Menggunung

Terlilit utang dengan bunga tinggi dapat membuat perusahaan kesulitan mencapai laba yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Kondisi ini menjadi semakin berat ketika pembayaran bunga yang besar terus menyedot arus kas perusahaan. Akhirnya, perusahaan kesulitan menjalankan operasional dan mencapai target bisnis.

2. Manajemen yang Buruk

Kurangnya kompetensi dalam manajemen strategis, termasuk perencanaan modal kerja, [anggaran keuangan](#), dan operasional, dapat menyebabkan kerugian besar. Perusahaan dengan manajemen yang tidak terorganisir sering kali menghadapi keputusan bisnis yang buruk, seperti pengelolaan sumber daya yang tidak efisien atau investasi yang tidak produktif, yang pada akhirnya menggerogoti profitabilitas.

3. Penurunan Penjualan

Penurunan signifikan dalam angka penjualan, baik karena persaingan ketat maupun kurangnya inovasi, dapat mengganggu pencapaian laba. Situasi ini semakin parah jika perusahaan tidak mampu membaca tren pasar atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, tanpa promosi yang efektif dan pengembangan produk, penurunan penjualan bisa terjadi secara terus-menerus hingga perusahaan kehilangan pangsa pasar.

4. Ketidakstabilan Ekonomi Global

Saat [ekonomi global](#) melemah, daya beli masyarakat menurun, sehingga bisnis ikut tertekan. Situasi ini sering kali diperparah oleh fluktuasi nilai tukar, inflasi yang tinggi, atau krisis finansial. Contoh nyata adalah dampak pandemi COVID-19 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar karena perubahan drastis dalam pola konsumsi dan aktivitas bisnis.

<https://www.lbs.id/publication/berita/bangkrut-kisah-4-perusahaan-besar-di-indonesia-yang-hancur-karena-utang>

Berjalan Amburadul, Prabowo Harus Hentikan MBG

Monday, 21 April 2025 - 12:31



Dokumen ICW. Amburadul Program Makan Bergizi Gratis

Tata kelola buruk, keliru menyalurkan anggaran, hingga dugaan penggelapan mewarnai proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Harus segera dihentikan.

Laporan [Tempo](#) sebelumnya menunjukkan potensi konflik kepentingan dalam proyek MBG. Para penyedia makanan diduga terafiliasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Temuan itu memperkuat dugaan masalah sebagaimana ICW [ungkap](#) sebelumnya. ICW lebih jauh mencatat empat permasalahan MBG.

Pertama, pengelolaan anggaran yang diduga sarat kecurangan. Belakangan terungkap dugaan penggelapan dalam penyaluran anggaran MBG. Mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, terpaksa tutup lantaran merugi hampir Rp 1 milyar. Mereka mengaku tidak menerima biaya dari Yayasan MBN, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Padahal, mitra dapur tersebut telah memasak 65.025 porsi selama Februari hingga Maret 2025.

Temuan itu menambah rentetan masalah pengelolaan anggaran. Di Sumenep, Madura, petugas dapur MBG berhenti bekerja karena beban kerja dan besaran upah. Laporan di beberapa lokasi juga mengungkap dugaan monopoli pembelian peralatan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Masalah-masalah itu sekaligus menunjukkan buruknya tata kelola dan lemahnya pengawasan dalam proyek MBG. Bukan tidak mungkin hal serupa meluas terjadi di berbagai tempat lainnya.

Kedua, penyaluran anggaran proyek MBG diduga melanggar peraturan. Anggaran MBG disalurkan melalui skema bantuan pemerintah. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Mengacu pada peraturan tersebut, anggaran MBG mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra BGN.

Dalam Pasal 24 Permenkeu 132/2021, disebutkan bahwa pemberian bantuan sarana/prasarana dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Jika bantuan dalam bentuk uang, sesuai Pasal 25 ayat (3) Permenkeu 132/2021, maka pemberian sarana/prasarana dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana.

Penyaluran anggaran lewat skema bantuan juga membuka celah praktik korupsi. Kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 oleh bekas Menteri Sosial Juliari Batubara adalah contohnya. Dalam pantauan ICW, dana bantuan rawan diselewengkan. Modus terbanyak yaitu laporan fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Ketiga, MBG diwarnai ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk. Ada laporan yang menunjukkan perbedaan penyediaan alat makan antar sekolah. Sebagian sekolah menerima makanan dengan wadah berbahan stainless steel yang aman dan layak pakai. Sementara, sekolah lainnya mendapatkan wadah berbahan plastik tipis dan mengandung bahan kimia berbahaya jika digunakan untuk makanan panas. Hal ini menunjukkan tidak adanya standarisasi layanan dalam pelaksanaan MBG.

Lebih jauh, kualitas makanan yang disediakan tidak memenuhi standar gizi minimal. Itu mencakup segi kandungan protein, vitamin, maupun keragaman menu. Terdapat temuan siswa di sekolah disajikan telur rebus yang tak layak dikonsumsi. Di beberapa sekolah, siswa bahkan membuang makanan karena rasa yang tak sedap.

Keempat, proses pembentukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tidak transparan. Dalam memenuhi target 3000 SPPI, pendaftaran calon SPPI malah menimbulkan serangkaian masalah, seperti nama calon peserta yang secara tiba-tiba hilang setelah dinyatakan lulus, platform pendaftaran yang tidak informatif dan sering bermasalah, sampai pelaksanaan program SPPI yang sepenuhnya diintervensi oleh militer.

Mengacu pada hal-hal di atas, Presiden Prabowo harus menunjukkan tanggung jawabnya dengan menghentikan proyek MBG.

Jakarta, 21 April 2025

Indonesia Corruption Watch

Narahubung:

Dewi Anggraeni - Peneliti ICW

Egi Primayogha - Peneliti ICW

Rofi - Peneliti ICW

<https://antikorupsi.org/id/berjalan-amburadul-prabowo-harus-hentikan-mbg#:~:text=Ada%20laporan%20yang%20menunjukkan%20perbedaan,jawabnya%20dengan%20menghentikan%20proyek%20MBG.>

Masih Bingung Kasus Mie Gacoan di Bali yang Diduga Gak Bayar Royalti?

Pingkan Anggraini

detikPop

Sabtu, 26 Jul 2025 10:03 WIB



Foto: Muhammad Aminudin/detikJatim

Jakarta - Lagi-lagi masalah royalti bikin geger publik nih. Kali ini bukan penyanyi, melainkan salah satu resto hits yang dilaporkan guys.

Ya, management Mie Gacoan di Bali, menjadi tersangka atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Tepatnya pada 24 Juni 2025, Polda Bali secara resmi menetapkan IAS, Direktur PT. Mitra Bali Sukses (Mie Gacoan) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran tindak pidana hak cipta.

Persoalannya karena mereka diduga dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik untuk penggunaan secara komersial.

Dari sini tercantum dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B/754/VI/RES.2.1/2025/Ditreskrimsus tanggal 24 Juni 2025.

Nah, kamu pasti masih bingung kan perihal ini?

Jadi, distribusi royalti performing rights selama ini ada tiga jenis guys. Pertama digital, yang meliputi pendapatan royalti dari layanan streaming sebagai sarana untuk menikmati lagu.

Lalu, kedua ada non digital yang meliputi pembayaran yang diterima oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta ketika lagu mereka digunakan dalam pertunjukan publik. Tentunya tidak melibatkan media digital, seperti siaran radio, konser, atau pertunjukan live di tempat-tempat umum lainnya termasuk resto.

Ketiga ada overseas atau luar negeri, pembayaran royalti dari luar negeri terkait lagu-lagu musisi Indonesia yang diputar di sana. Termasuk konser musik musisi Tanah Air di luar negeri.

Nah, jadi terkait kasus Mie Gacoan di Bali, diduga mereka tidak melakukan pembayaran performing

rights untuk distribusi non digital kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pengkolektif royalti nih.

detikcom kemudian menanyakan total nominal yang selama ini harusnya dibayarkan pihak Mie Gacoan di Bali. LMKN melalui Dharma Oratmangun selaku ketua pun blak-blakan nih.

Yup, dalam pengkolektifan lagu di Mie Gacoan di Bali, LMKN menerapkan sistem blanket license, dimana pengguna boleh memutar lagu secara digital atau live performance tanpa ada batasan jumlah. Nah, ini berguna selama setiap satu tahun ya guys.

"Jadi diberikan berdasarkan penggunaan selama satu tahun. Berapa besarannya itu dihitung dengan tarifnya itu menghitung jumlah kursi, luasnya (bangunan resto). Dan jumlah kursi itu (satu kursinya) Rp 120 ribu (untuk) satu tahun, gitu," ujar Dharma Oratmangun saat dihubungi detikcom.

Jadi, besaran royalti dihitung berdasarkan rumus jumlah kursi dalam satu outlet x Rp 120 ribu x 1 tahun x jumlah outlet. Dari perhitungan ini, nilai kerugian disebut mencapai miliaran rupiah.

<https://www.detik.com/pop/music/d-8030077/masih-bingung-kasus-mie-gacoan-di-bali-yang-diduga-gak-bayar-royalti>.